

STRATEGI PERUNDINGAN TIMOR LESTE DENGAN INDONESIA DI BLOK GREATER SUNRISE TAHUN 2004-2010

Dewa Bagus Ariwangsa Putra, D.A.Wiwik Dharmiasih, Putu Titah Kawitri Resen
bagusariwangsaputra94@gmail.com, kawitriresen@unud.ac.id, wiwikd@unud.ac.id

ABSTRAK

This research explained Timor Leste's strategy on hoisting Batek Island ownership issue which is used to gain advantages in negotiation of southern sea border, which is Block Greater Sunrsie. Qualitative method was used as a means to collect secondary data through the documentation and literature study. Afterwards, all of the secondary data was analysed by using foreign policy theory, concept of national interest and also concept of power to explain the reason behind Timor Leste's hoisting the ownership issue of Batek Island issue based on intentions to gain one of natural source of power, which is natural resources. By getting that power sources, that's closely related to the national interest of Timor Leste, that is to pursuit their state survival. That source of power is the means for Timor Leste to achieve of one its national interests, that is state survival. which is closely related to the national interest of Timor Leste, is one of the main

Keywords: *national interest, state survival, border dispute, power*

1. PENDAHULUAN

Timor Leste adalah sebuah negara yang baru memperoleh kemerdekaanya di tahun 2002. Timor Leste sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tahun 1998-1999, Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia melalui proses *referendum*. Pasca *referendum*, para milisi yang menolak kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia melakukan pelbagai macam tindakan kekerasan seperti pembunuhan dan pengrusakan terhadap beberapa bangunan di Timor Leste (BBC, 2003). Situasi konflik yang terjadi kemudian menyebabkan PBB mengirimkan pasukan keamanan ke

Timor Leste guna membantu menormalkan kembali situasi keamanan disana (BBC, 2005).

Pasca konflik tersebut, Pemerintah Timor Leste mulai memprioritaskan pembangunan di sektor ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan menempatkan sektor minyak dan gas (migas) sebagai sektor utama. Hal ini mengingat pendapatan dari sektor migas merupakan bagian terbesar dari perekonomian Timor-Leste (Hamutuk, 2005: 2). Merujuk data tahun 2012 yang menjelaskan tiga per empat GDP Timor Leste didapat dari ekspor migas (The Jakarta Post, 2013). Data di tahun 2012 mencatat total GDP Timor Leste sebesar 5.579 juta USD yang mana 77.2 persen berasal dari sektor migas

dan sisanya 22.8 persen berasal dari sektor non-migas (Official Spokesperson for the Government of Timor-Leste, 2014). Pendapatan dari sektor migas tersebut sebagian besar berasal dari ladang minyak dan gas Bayu Undan. Ladang Bayu-Undan mengandung sekitar 400 juta barelcadangan minyak dan 3.4 *Trillion Cubic Feet* (TCF) gas alam (Franco dan Sandbu, 2008). Akan tetapi, pengelolaan ladang minyak dan gas Bayu Undan yang dimulai tahun 2004 akan berakhir di tahun 2023. Kekhawatiran tersebut kemudian memaksa Pemerintah Timor Leste untuk mencari ladang minyak dan gas alam yang terdapat di wilayah lain Timor Leste (La'o Hamutuk, 2005).

Blok *Greater Sunrise* merupakan ladang minyak dan gas terbesar yang berada di wilayah perairan selatan yang ditemukan pada tahun 1974 (Rmol, 2016). Blok tersebut diperkirakan memiliki kandungankondensat sebanyak 300 juta bareldan 8.3 TCF gas alam (Petroleum Economist, 2011). Besarnya potensi tersebut menarik perhatian Pemerintah Timor Leste. Akan tetapi, letak Blok *Greater Sunrise* yang berada diantara perbatasan laut Timor Leste dan Indonesia membuat pengembangan Blok tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Pemerintah Timor Leste melihat perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan Pemerintah Indonesia sebelum dilakukannya pengembangan Blok *Greater Sunrise*.

Pemerintah Timor Leste kemudian memanfaatkan permasalahan wilayah dan tapal batas antara Timor Leste-Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar terkait Blok *Greater Sunrise*. Hal ini dilakukan Pemerintah Timor Leste dengan menggunakan klaim atas Pulau Batek untuk memaksa Indonesia menggeser garis lateral batas laut Timor Leste-Indonesia di wilayah perairan Selatan. Hal ini terlihat saat Ramos Horta, perwakilan Timor Leste dalam pertemuan *Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism* di Bali tahun 2004, menyampaikan klaim atas Pulau Batek dalam perundingan penetapan batas maritim Timor Leste-Indonesia di perairan Selatan (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007). Lebih lanjut, Penulis kemudian tertarik melihat alasan Timor Leste memunculkan isu kepemilikan Pulau Batek dalam perundingan penetapan batas maritim Timor Leste-Indonesia di perairan Selatan, ketika kepentingan utamanya adalah untuk memperoleh Blok *Greater Sunrise*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan sebuah artikel ilmiah dan sebuah buku sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Artikel ilmiah yang dipakai Penulis ditulis oleh Naseer Ahmed Kalis dan Shaheen Showkat Dar di tahun 2013 yang berjudul *Geo-Political Significance of Kashmir: An Overview of Indo-Pak Relation*. Sementara, buku yang dipakai

Penulis ditulis oleh Majid Khadduri dan Edmund Ghareeb di tahun 1997 dengan judul *War in The Gulf 1990-1991 The Iraq-Kuwait Conflict and Its Implications*.

Kalis dan Dar (2013) dalam tulisannya membahas tentang konflik yang terjadi antara India dan Pakistan terkait perebutan wilayah Kashmir. Perseteruan Pakistan dan India dalam memperebutkan wilayah Kashmir sudah dimulai sejak tahun 1947. Ketika itu, Pakistan melalui Perdana Menteriya, Liaqat Ali Khan, menolak keabsahan *Instrument of Accession* yang menjadi dasar India dalam merebut wilayah Kashmir. India sendiri berupaya menyelesaikan sengketa dengan Pakistan dengan berinisiatif membawa sengketa Kashmir ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB kemudian membentuk komisi khusus yakni *United Nations Commission for India and Pakistan* (UNCIP) untuk membantu India dan Pakistan menyelesaikan sengketa Kashmir. Akan tetapi, usaha UNCIP tersebut gagal. Pakistan secara terus-menerus memunculkan permasalahan di wilayah Kashmir seperti; terorisme, konflik bersenjata, *infiltration*, dan perang gerilya. Kalis dan Dar (2013) menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Pakistan tersebut sebagai bentuk usaha Pakistan untuk memperoleh kepentingannya di wilayah Kashmir.

Kepentingan yang ingin diperoleh Pakistan dari wilayah Kashmir (Kalis dan Dar, 2013), yaitu; kepentingan

pertahanan dan keamanan serta sumber daya alam. Posisi geografis Kashmir yang strategis menunjang pertahanan dan keamanan Pakistan. Kashmir merupakan wilayah yang dilalui oleh *Great Silk Route*, jalur perdagangan kuno yang menghubungkan wilayah Cina dan Eropa. Rute tersebut menghubungkan wilayah Abbatabd di Pakistan dengan wilayah Muree di Cina. Pemerintah Pakistan hendak memanfaatkan rute tersebut untuk membangun kerja sama keamanan dengan Cina di bidang nuklir. Kashmir juga merupakan wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai besar seperti Indus, Jhelum, dan Chenab. Pakistan bergantung pada sungai-sungai tersebut sebagai sumber mata air utama penduduk Pakistan. Tulisan Kalis dan Dar (2013) membantu Penulis melihat kebijakan luar negeri (*foreign policy*) yang diambil oleh Pakistan terkait wilayah Kashmir. Pelbagai konflik yang dimunculkan Pakistan di wilayah Kashmir merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya (*national interest*).

Tulisan berikutnya diambil dari buku Khadduri dan Ghareeb (1997) yang membahas tentang invasi Irak ke Kuwait di tahun 1990-1991. Irak beralasan bahwa invasi yang dilakukan ke Kuwait merupakan bentuk klaim atas kedaulatan Irak. Pemerintah Irak menyebut Kuwait merupakan bagian dari wilayahnya di Basra. Basra sendiri

merupakan salah satu provinsi Irak yang berada di daerah Selatan. Hubungan tersebut disimbolkan dengan slogan *Kuwait is a branch of the trunk*. Khadduri dan Ghareeb (1997) menjelaskan alasan utama yang mendorong Irak menginvasi Kuwait adalah karena perang delapan tahun antara Irak dan Iran. Irak tidak melihat prospek perdamaian dengan Iran pasca diberlakukannya gencatan senjata oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kecurigaan Irak terhadap Iran untuk melanjutkan peperangan membuat Irak akhirnya memutuskan meningkatkan program persenjataannya (Khadduri dan Ghareeb, 1997:96). Sebagai konsekuensi, utang luar negeri Irak menumpuk sehingga berdampak pada anggaran pendapatan negara. Kondisi keuangan Irak diperparah dengan semakin berkurangnya keuntungan dari ekspor minyak. Hal itu dikarenakan Kuwait mengejar produksi minyak sesuai dengan permintaan pasar sehingga harga minyak dunia menjadi jatuh. Khadduri dan Ghareeb (1997), melihat alasan Irak menginvasi Kuwait dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional (*national interest*) Irak. Irak yang sangat bergantung dengan sektor minyak merasa keberlangsungan hidup negaranya (*state survival*) terancam akibat jatuhnya harga minyak dunia. Hal ini berdampak pada keuntungan Irak dari sektor minyak yang menjadi berkurang. Sementara untuk mendukung program persenjataannya Irak menempatkan keuntungan dari

sektor minyak sebagai hal utama. Untuk alasan inilah Pemerintah Irak memutuskan melakukan invasi ke Kuwait.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berangkat dari suatu data yang diperoleh dan menggunakan konsep atau teori untuk membantu menjelaskan permasalahan tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, koran, situs pemerintah terkait atau berupa informasi yang diperoleh dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Terkait tingkat analisa, dikutip dari Waltz (1979) dalam Mas'ood (1994) yang mengidentifikasi tingkatan analisa menjadi tiga, yakni: individu, negara dan sistem internasional. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tingkatan analisa negara. Teknik pengumpulan data Penulis pada penelitian menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Kondisi Timor Leste Pasca Merdeka dari Indonesia

Pasca lepas dari Indonesia di tahun 1999, Timor Leste dihadapkan pada persoalan ekonomi. Harga-harga

kebutuhan pokok seperti beras, gula dan bensin melonjak di pasaran (Kompas, 1999). Kondisi ini diperparah dengan munculnya konflik akibat kekecewaan pihak pro-integrasi terhadap hasil *referendum*. Pihak pro-integrasi melakukan pelbagai tindakan kekerasan, teror, serta intimidasi pada pihak pro-kemerdekaan. Konflik yang terjadi menghancurkan 90 persen fasilitas pembangkit listrik (UNDP, 2002:57), 77 persen fasilitas kesehatan dan 95 persen bangunan sekolah di Timor Leste (Doyle & Sambanis, 2006:248). *Commission for Reception, Truth and Reconciliation Timor Leste* (CAVR) di tahun 2005 melaporkan wilayah-wilayah dengan jumlah kekerasan dengan pembunuhan tertinggi terjadi di Ermera, Baucau, Lautem dan Manufahi. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Timor Leste saat itu.

Rendahnya perolehan pendapatan per-kapita Timor Leste selama beberapa tahun setelah terjadinya konflik pasca *referendum* berimplikasi pada tingginya angka kemiskinan di Timor Leste. Merujuk pada laporan *World Bank* tahun 2007, lebih dari 40 persen penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran yang meningkat dari 43 persen menjadi 58 persen. Hal ini disebabkan sulitnya membuka lapangan pekerjaan pasca konflik di Timor Leste. *World Bank* (2007) menambahkan

dalam laporannya bahwa berdasarkan data sensus nasional tahun 2004, sepertiga penduduk Timor Leste di rentang usia 25-29 tahun adalah pengangguran. Timor Leste sendiri masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran terutama dikalangan pemuda. Pemerintah Timor Leste kemudian mengambil kebijakan yang memprioritaskan pembangunan sektor ekonomi untuk menghindari munculnya kembali konflik (World Bank, 2007:30).

2.2 Kebijakan Ekonomi Timor Leste Pasca Merdeka

Perekonomian Timor Leste bergantung pada dua sektor yaitu migas dan non-migas. Pemerintah Timor Leste melihat peluang yang cukup besar dari sektor migas. Pendapatan sektor migas Timor Leste kurun waktu lima tahun yakni dari tahun 2005-2010 terus meningkat. Dalam kurun waktu tersebut, sektor migas Timor Leste mampu naik sebesar 16 persen dengan memberikan peningkatan pendapatan sebesar 2.875 USD (La'o Hamutuk, 2005). Besarnya pendapatan ekonomi Timor Leste dari sektor migas bersumber dari pengelolaan sektor hulu dan hilir dari beberapa ladang minyak dan gas yang berada di wilayah *Joint Petroleum Development Area* (JPDA)¹.

¹ Berdasarkan *Timor Sea Treaty* (2010) *Joint Petroleum Development Area* (JPDA) merupakan wilayah

Pengelolaan sektor hulu berasal dari proses pengolahan minyak dasar laut, sedangkan pengelolaan sektor hilir berasal dari pengolahan gas alam. Pendapatan sektor hulu Timor Leste bersumber dari beberapa ladang minyak di wilayah JPDA, seperti: Elang-Kakatua, *Buffalo* dan Bayu-Undan, sedangkan pengelolaan sektor hilir berasal dari Ladang Bayu-Undan (Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, 2012). Persentase keuntungan yang diterima Timor Leste dari pengelolaan sektor hulu dan hilir dari ladang migas di wilayah JPDA adalah sebesar 50 persen dari keseluruhan keuntungan produksi. Sisa 50 persen lainnya diambil oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Timor Leste (Sýkora, 2013; La'ó Hamutuk, 2002).

Ladang Elang-Kakatua ditemukan di tahun 1990 (Oil Watch, 2005) dan merupakan salah satu ladang minyak dan gas di wilayah JPDA (Development Studies Network, 2005). Kendati ukurannya kecil, Ladang Elang-Kakatua diperkirakan menyimpan cadangan minyak sebesar 56 juta barel (Cadman & Temple, 2003). Sekitar 90 persen dari cadangan minyak yang dimiliki Ladang Elang-Kakatua telah dieksplorasi oleh Perusahaan *Conoco Phillips* yang beroperasi di tahun 1998. Timor Leste sendiri memperoleh pendapatan sekitar 47.8 juta USD dari Ladang Elang-

pengembangan minyak dan gas bersama yang berada di wilayah Laut Timor.

Kakatua di tahun 2002 dan meningkat menjadi 51.9 juta USD di tahun 2003 (Oil Watch, 2005). Akan tetapi, produksi minyak dari Ladang Elang-Kakatua berhenti di pertengahan tahun 2007 karena cadangan minyak yang terdapat pada ladang tersebut telah habis (Oil Watch, 2005; CCOP, 2009). Ladang minyak lainnya yang juga berada di wilayah Laut Timor adalah Ladang *Buffalo*. Ladang *Buffalo* ditemukan oleh perusahaannya *Broken Hill Proprietary* (BHP) di tahun 1996 (SEG, 2001) dan mulai memproduksi minyak pada Desember 1999. Perusahaan BHP kemudian digantikan oleh Perusahaan *Nexen* sebagai operator resmi di tahun 2001 setelah saham dari perusahaan tersebut dijual kepada Perusahaan *Nexen* (Cadman & Temple, 2003). Ladang *Buffalo* diperkirakan mengandung sekitar 31 juta barel cadangan minyak. Dari eksplorasi yang dilakukan oleh Perusahaan *Nexen*, sekitar 45.000 barel cadangan minyak mampu diolah per harinya dan mendatangkan keuntungan sekitar satu juta USD bagi Timor Leste (Symon, 2001). Namun di tahun 2004, Ladang *Buffalo* berhenti beroperasi setelah cadangan minyak di ladang tersebut dinyatakan telah habis. Ladang Bayu-Undan merupakan ladang minyak dan gas terbesar di wilayah JPDA. Ladang Bayu-Undan diperkirakan mengandung 400 juta barel cadangan minyak dan 3.4 TCF gas alam (Oil Watch, 2005) dan mulai dikelola sejak April 2004 (La'ó Hamutuk, 2005). Estimasi keuntungan

yang diperoleh Timor Leste dari Ladang Bayu-Undan diperkirakan mencapai tiga milyar USD (International Monetary Fund, 2005:16), yang mana 1.8 milyar USD diperoleh dari produksi minyak dan 1.2 milyar USD dari produksi gas.

Pemerintah Timor Leste menyadari bahwa produksi minyak dan gas dari ladang-ladang migas yang berada di wilayah negaranya tidak akan berproduksi selamanya. Ladang Elang-Kakatua berhenti setelah beroperasi selama 17 tahun. Produksi dari Ladang *Buffalo* berakhir setelah lima tahun beroperasi. Begitu juga dengan Ladang Bayu-Undan yang akan berakhir di tahun 2023 setelah 19 tahun beroperasi (Oil Watch, 2005). Kekhawatiran tersebut kemudian menyebabkan Pemerintah Timor Leste mencari ladang migas lain di wilayahnya. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan Blok *Greater Sunrise*, sebuah ladang kaya migas yang terletak di Laut Timor.

Blok *Greater Sunrise* merupakan sebuah kawasan kaya minyak dan gas alam yang terletak di Laut Timor tepatnya di wilayah perbatasan Timor Leste dengan Indonesia (La'o Hamutuk, 2003). Pemerintah Timor Leste menaruh perhatian yang cukup besar pada Blok *Greater Sunrise* karena jumlah kandungan minyak dan gas yang dimiliki. Blok *Greater Sunrise* diperkirakan memiliki kandungan cadangan minyak sebesar 300 juta barel dan 8.3 TCF gas alam. Besarnya

kandungan minyak dan gas tersebut berasal dari dua ladang yang terdapat pada Blok *Greater Sunrise* yakni Ladang *Sunrise* dan Ladang *Troubadaour* (La'o Hamutuk, 2004). Pengelolaan minyak dan gas pada Blok *Greater Sunrise* diperkirakan memberi keuntungan lebih dari 100 miliar USD (The Jakarta Post, 2013) dan turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Timor Leste (Japan Time, 2014). Besarnya keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi Blok *Greater Sunrise*, membuat Timor Leste menaruh perhatian yang cukup besar dengan blok tersebut. Akan tetapi, letak Blok *Greater Sunrise* yang berada di wilayah perbatasan maritim Timor Leste-Indonesia membuat pengembangan Blok *Greater Sunrise* sulit untuk dilakukan sehingga perlu sebuah strategi untuk mendapatkan blok tersebut.

4.3. Perbatasan Timor Leste dengan Indonesia

Lepasnya Timor Leste dari NKRI meninggalkan masalah perbatasan di antara kedua negara. Wilayah perbatasan Timor Leste dengan Indonesia dapat dibagi menjadi dua yakni batas darat dan batas laut. Wilayah batas darat antara Timor Leste dengan Indonesia memiliki keseluruhan panjang yang mencapai 268.8 kilometer (Antara News, 2013). Wilayah perbatasan kedua negara terbagi menjadi dua wilayah yakni, Sektor Timur sepanjang 149.1 km dan Sektor Barat

sepanjang 119.7 km (LIPI, 2013). Sektor Timur meliputi perbatasan antara Distrik Covalina, Timur Leste, dengan Kabupaten Belu, Indonesia. Sektor Barat meliputi wilayah *enclave* atau wilayah kantong yakni Distrik Oecussi, Timor Leste, yang berbatasan dengan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Utara, Indonesia (Antara News, 2015). Empat persen dari keseluruhan tapal batas darat tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan. Salah satunya terletak di Sektor Barat yakni Kabupaten Ambeno, Distrik Oecusse, Timor Leste, yang berbatasan dengan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia (Kompas, 2015). Permasalahan perbatasan di Sektor Barat muncul karena karakteristik daerah aliran sungai yang berada di wilayah tersebut selalu bergeser. Pergeseran yang kerap terjadi menyulitkan penentuan batas wilayah Timor Leste dan Indonesia (Tempo, 2010). Kesulitan penentuan batas di wilayah ini juga disebabkan karena pertimbangan daerah aliran sungai yang dijadikan patokan titik koordinat Pulau Batek. Hal ini akan menentukan negara mana yang berhak memiliki Pulau Batek (Tempo, 2010).

Perbatasan laut antara Timor Leste dengan Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah. Wilayah Selatan meliputi wilayah Laut Timor yang berbatasan dengan Indonesia (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007: 60). Wilayah Utara meliputi wilayah

Pulau Timor yang berbatasan dengan Laut Wetar dan Selat Ombai. Wilayah Tengah meliputi wilayah perairan Oecussi, Timor Leste, yang berbatasan dengan wilayah perairan NTT, Indonesia (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007: 61). Wilayah perbatasan laut antara Timor Leste dan Indonesia menimbulkan permasalahan karena keberadaan sumber daya minyak dan gas disepanjang garis batas maritim kedua negara (Deely, 2001: 18). Salah satunya adalah Blok *Greater Sunrise* yang berada di perbatasan laut Timor Leste dengan Indonesia di perairan Selatan. Sengketa batas laut dengan Indonesia di perairan Selatan inilah yang menyebabkan keinginan Timor Leste untuk melakukan eksplorasi terhadap Blok *Greater Sunrise* mengalami kendala (La'o Hamutuk, 2003). Permasalahan tapal batas antara Timor Leste dengan Indonesia seringkali menimbulkan konflik di antara kedua negara. Tahun 2003 terjadi konflik di Distrik Oecussi, Timor Leste, yang berbatasan langsung dengan Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, yang disebabkan oleh penolakan warga Timor Leste terhadap tapal batas yang ditetapkan di wilayah tersebut (Tempo, 2013). Menteri Luar Negeri Timor Leste dan Menteri Luar Negeri Indonesia kemudian menetapkan 907 titik tapal batas (Bakosurtanal, n.d.) melalui *Provisional Agreement (PA)* (Liputan6, 2010). Ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan kedua negara

untuk menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada. Selain itu, kedua pemerintahan juga mulai menjalin kerja sama yang baik di sejumlah sektor seperti pendidikan, ekonomi dan pertahanan (CNN Indonesia, 2015). Akan tetapi, keinginan Timor Leste untuk melakukan eksplorasi di Blok *Greater Sunrise* dapat memicu permasalahan perbatasan baru dengan Indonesia. Hal ini juga dapat merusak hubungan baik yang baru terjalin diantara kedua negara. Disisi lain, Timor Leste sebagai sebuah negara yang baru merdeka tidak memiliki kemampuan yang sebanding dengan Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah Timor Leste menerapkan strategi dalam perundingannya dengan Indonesia untuk mendapatkan Blok *Greater Sunrise*.

4.4.Strategi Perundingan Timor Leste dengan Indonesia untuk Memperoleh Blok *Greater Sunrise*

Keinginan Timor Leste untuk melakukan pengembangan pada Blok *Greater Sunrise* terlihat ketika Pemerintah Timor Leste menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan eksplorasi *Woodside* di tahun 2002 (La'o Hamutuk, 2005). Melalui kerja sama tersebut, Timor Leste memiliki peluang untuk melakukan pengembangan lebih jauh dari sektor hulu dan hilir pada Blok *Greater Sunrise*. Keinginan tersebut makin terlihat ketika di tahun 2004, Pemerintah Timor Leste ingin

melakukan pemasangan pipa bawah laut yang dapat menghubungkan wilayah pesisir Selatan Timor Leste dengan Blok *Greater Sunrise* (World Bank, 2005).

Akan tetapi, keinginan Timor Leste untuk mengelola Blok *Greater Sunrise* terhalang oleh permasalahan batas maritim dengan Indonesia. Pemerintah Timor Leste telah beberapa kali melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia terkait batas maritim kedua negara, namun belum menghasilkan kesepakatan bersama. Tanggal 18-19 Desember 2002 merupakan awal perundingan Pemerintah Timor Leste dengan Pemerintah Indonesia untuk membahas permasalahan batas maritim kedua negara. Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia melalui pertemuan tersebut membentuk sebuah komite bersama yakni *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC-BDR) (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007). TSC-BDR memiliki program yang memprioritaskan kegiatan survei deliniasi², yang memfokuskan pada permasalahan deliniasi perbatasan maritim dan darat kedua negara (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007). Akan tetapi, komite khusus tersebut tidak berhasil

²Deliniasi menurut BAKOSURTANAL (2006) adalah penarikan garis batas sementara suatu wilayah atau suatu negara di atas peta.

menentukan batas deliniasi yang bisa disepakati kedua negara terutama pada perbatasan maritim (Republika, 2012). Kegagalan TSC-BDR disebabkan karena pemerintah kedua negara bersikeras atas kepentingan masing-masing.

Ketidakmampuan Timor Leste dalam memaksakan kepentingannya dalam perundingan dengan Indonesia menjadi penyebab gagalnya Timor Leste dalam memperoleh hak untuk mengelola Blok *Greater Sunrise* secara menyeluruh. Ketidakmampuan Timor Leste dikarenakan tidak sebandingnya kekuatan (*power*) yang dimiliki Timor Leste dengan Indonesia. Selain itu, Timor Leste tidak ingin mengganggu hubungan dengan Indonesia yang baru terjalin dengan baik. Ini lantas mempengaruhi sikap Pemerintah Timor Leste yang sangat berhati-hati dalam membahas permasalahan Blok *Greater Sunrise*. Pemerintah Timor Leste dalam perundingan batas maritim dengan Indonesia selalu berusaha menawarkan untuk menggeser garis lateral batas maritim yang berada di perairan Selatan. Namun, tawaran tersebut selalu ditolak oleh Pemerintah Indonesia. Kedua negara sama-sama ingin memperoleh keuntungan atas sejumlah ladang minyak dan gas di wilayah tersebut.

Strategi yang diajukan oleh Pemerintah Timor Leste berubah ketika di awal tahun 2004 Pemerintah Indonesia melakukan latihan militer di

wilayah perairan Pulau Batek. Pemerintah Timor Leste menanggapi insiden tersebut dengan mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia atas tindakan militer Indonesia di perairan Pulau Batek (Tempo, 2005). Sejak insiden tersebut, Pemerintah Timor Leste kemudian menggunakan isu Pulau Batek sebagai strategi perundingan untuk mendapatkan Blok *Greater Sunrise*. Pemerintah Timor Leste melihat sengketa atas kepemilikan Pulau Batek sebagai peluang tawar kepada Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan Blok *Greater Sunrise*. Ada dua alasan yang digunakan oleh Timor Leste untuk berani mengangkat sengketa kepemilikan Pulau Batek sebagai posisi tawar dalam perundingan wilayah maritim dengan Indonesia. Pertama, letak strategis Pulau Batek. Pulau Batek merupakan sebuah pulau yang terletak di perbatasan antara wilayah *enclave* Timor Leste yakni Distrik Oecusse dengan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Batek secara fisik berbentuk bukit sisa atau sering disebut *mesa* dengan wilayah yang dikelilingi tebing terjal dengan kemiringan 40 sampai dengan 60 derajat. Posisi Pulau Batek pada 9°15'25" Lintang Selatan 12°59'30" Bujur Timur berada lebih dekat dengan Timor Leste dibandingkan dengan Indonesia. Jika dilihat dari Pantai Oecusse, Pulau Batek berjarak sekitar 5 km dari Timor Leste sementara jika dilihat dari Pantai Kupang, Nusa

Tenggara Timur, Indonesia, Pulau Batek berjarak sekitar 1.150 km (Direktorat Pulau-Pulau Kecil Indonesia, n.d). Kedua, kepemilikan Pulau Batek dari sisi sejarah. Klaim Timor Leste atas kepemilikan Pulau Batek didasari oleh *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominion on the Island of Timor*, yang merupakan hasil dari perjanjian Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis di tahun 1904. Konvensi tersebut menyebutkan posisi Pulau Batek yang keberadaannya ditentukan menggunakan muara aliran sungai (*thalweg*) yang berada di wilayah perbatasan Distrik Oecusse, Timor Leste dengan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sebagaimana dikutip dari *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominion on the Island of Timor, Article III*;

“Proceeding from the mouth of the Noel [river] Besi, from where the summit of Pulu [island] Batek can be sighted, on a 30°47'NW astronomical azimuth, following the thalweg of the Noel Besi, that of the Noel Niema and of the Bidjael Sunan, up to its source”

Pemerintah Timor Leste melalui konvensi tersebut memiliki tafsiran atas wilayah aliran sungai yang berada di sisi Barat. Tafsir Pemerintah Timor Leste didasari atas bukti sejarah bahwa Kerajaan Ambenu, Timor Leste, yang berbatasan dengan Kerajaan Amfoang, Indonesia, menggunakan aliran sungai di sisi Barat sebagai tapal batas kerajaan (Kompas, 2009). Timor Leste melihat jika tapal batas tersebut disetujui, maka hal itu akan menguntungkan posisi Timor Leste

untuk mendapatkan Pulau Batek (Tempo, 2014).

Dua alasan kepemilikan Pulau Batek berdasarkan letak dan sejarah itulah yang kemudian membuat Timor Leste memiliki keyakinan untuk menggunakan klaim kepemilikan sebagai posisi tawar dalam merundingkan batas maritim kedua negara. Ramos Horta, yang menjadi perwakilan Timor Leste dalam pertemuan *Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism* di Bali tahun 2004, menyatakan Timor Leste akan melepaskan klaimnya terhadap Pulau Batek, jika Indonesia bersedia menggeser garis lateral batas maritim di wilayah perairan Selatan (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007: 35-37). Pernyataan Ramos Horta tersebut menegaskan upaya Timor Leste memunculkan klaim kepemilikan atas Pulau Batek pada dasarnya hanya menjadi komoditas perundingan untuk menguatkan posisi tawar Pemerintah Timor Leste dalam perundingan batas maritim dengan Pemerintah Indonesia. Sikap Timor Leste tersebut sejalan dengan penjelasan Schelling (1996), bahwa dengan memunculkan konflik dapat menjadi strategi dalam memaksa lawan dalam sebuah perundingan untuk melakukan apa yang diinginkan.

Jika garis lateral batas maritim yang berada di perairan selatan bisa digeser, maka akan memberi keuntungan bagi Timor Leste. Pergeseran garis lateral batas maritim di

posisi 9°22'53" Lintang Selatan dan 127°48'42" Bujur Timur akan membuka peluang yang lebih besar bagi Timor Leste untuk mendapatkan sumber daya alam di Maritim Timor, salah satunya kepemilikan terhadap Blok *Greater Sunrise*. Upaya Pemerintah Timor Leste dalam mendukung klaimnya terhadap Pulau Batek diwujudkan dengan pelbagai tindakan di wilayah yang dijadikan titik penentuan kordinat Pulau Batek. November tahun 2008, Timor Leste membangun pos imigrasi di wilayah sengketa tapal batas yang digunakan untuk menentukan titik kordinat Pulau Batek. Namun, pembangunan pos imigrasi tersebut akhirnya dihentikan setelah Pemerintah Indonesia memberikan nota protes kepada Pemerintah Timor Leste atas pembangunan di wilayah tersebut (Kemenhan, 2010). Mei tahun 2009, terdapat bangunan kantor pertanian dan balai pertemuan yang diresmikan oleh Menteri Pertanian RDTL di wilayah yang sama (Kemenhan, 2010). April tahun 2010, Timor Leste melakukan pemasangan nama gedung bertuliskan *Manesterio Da Agrikultura*, serta ditemukan aktivitas LSM OACP (*Oecusse Ambono Community Programme*) (Kemenhan, 2010).

3. KESIMPULAN

Negara dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu perbatasan menggunakan pelbagai macam strategi seperti; mediasi, arbitasi serta taktik-taktik yang didasari

pada proses tawar menawar dalam mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh negara bertikai. Strategi Timor Leste memunculkan sengketa kepemilikan Pulau Batek dalam perundingan batas maritim dengan Indonesia, merupakan bagian dari strategi taktik yang menekankan pada proses tawar menawar. Schelling (1996) bahkan menegaskan bahwa strategi memunculkan konflik dalam sebuah perundingan dianggap merupakan cara efektif meningkatkan posisi tawar negara dalam sebuah perundingan untuk memaksa lawan melakukan hal yang kita inginkan. Alasan negara menggunakan konflik dalam sebuah perundingan sebagai strategi dilatarbelakangi oleh tidak sebandingnya *power* yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga memunculkan konflik dianggap menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dalam perundingan.

Strategi Pemerintah Timor Leste memunculkan sengketa wilayah dengan Indonesia dapat menjadi cerminan dari konflik kadang digunakan sebagai daya tawar dalam perundingan. Keputusan Pemerintah Timor Leste dalam memunculkan konflik dapat dilihat sebagai keputusan rasional dari sebuah negara dalam memperoleh kepentingan nasionalnya. Hal ini menurut Jones (1993) dikarenakan negara pada dasarnya ingin memperoleh kepentingan nasionalnya guna mempertahankan kelangsungan

hidupnya (*statesurvival*), yang mana dalam mempertahankan kepentingan tersebut memaksa negara untuk melakukan pelbagai macam strategi termasuk memunculkan konflik dalam sebuah perundingan. Akan tetapi, strategi ini juga memiliki kelemahan, mengingat *power* negara yang tidak sebanding sering kali membuat lawan berunding mengabaikan tawaran dalam perundingan tersebut, dan bahkan memberikan tekanan balik sebagai balasannya. Oleh karena itu, upaya negara menggunakan konflik sebagai strategi dalam perundingan harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat seperti letak strategis dari wilayah serta dokumen sejarah yang dapat menunjang strategi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2003). *Perjalanan Timor Leste menuju kemerdekaan, yang akhirnya dicapai pada tanggal 20 Mei 2002, sangat panjang dan penuh trauma*. Diperoleh dari http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2003/11/031103_timor.shtml.
- BBC. (2008). Presiden Timor Leste 'koma'. Diperoleh dari www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/02/080211_hortacoma.shtml.
- BBC. (2011). *Crude oil and its uses*. Diperoleh dari http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/21c/materials_choices/crude_oil_uses_rev2.shtml.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: PALLGRAVE MACMILLAN™
- Cadman, S.J. and Temple, P.R., 2003. *Bonaparte Basin, NT, WA, AC & JPDA*. Australia: Canberra
- CIA Factbook. (2015). Diperoleh dari https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/print_id.html. Diakses tanggal 10 Januari 2017
- CNN. (2015). *Ramos Horta: Indonesia-Timor Leste Harmonis sejak Era Gus Dur*. Diperoleh dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150728212043-106-68705/ramos-horta-indonesia-timor-leste-harmonis-sejak-era-gus-dur>.
- Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste. (2005). *Chega! The Report of the Commission for Reception, Truth, and Reconciliation Timor-Leste Executive Summary*. Diperoleh dari <https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/Chega!-Report-Executive-Summary.pdf>.
- Deely, N. (2001). *Boundary and Territory Briefing*. International Boundaries Research Unit: University of Durham South Road.
- Development Studies Network. (2005). *Development Bulletin*. Diperoleh dari <https://crawford.anu.edu.au/rmap/devnet/devnet/db-68.pdf>. Diakses tanggal 20 Maret 2016
- Diplomat. (2016). Timor Leste's Dangerous Politics; Union. Diperoleh dari <http://thediplomat.com/2016/05/timor-lestes-dangerous-political-union/>.
- Global Fire Power. (2015). *Indonesia Military Strength*. Diperoleh dari http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indone

sia. Diakses tanggal 16
Januari 2017

Griffits, M., O'Callaghan, P. (2002).
*International Relations: The
Key Concepts*. New York:
Routledge

Hastedt, G., P., Knickerhm, M. (2003).
*International Politics in a
Changing world*. New York:
Longman

Jones, Walter S. (1993). Logika
Hubungan Internasional
Kekuasaan, Ekonomi Politik
Internasional dan Tatanan
Dunia. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.

